

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
PLN	KOMPAS	14	30-8-2002

Pemerintah Jamin Tak Ada Kartel Listrik

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan PT PLN (Persero) menjamin tak akan ada kartel listrik, meski listrik tidak lagi dimonopoli oleh PLN dan akan ada swasta yang bergerak di sektor pembangkit, transmisi, distribusi, dan penjualan menyusul pengesahan Rancangan Undang-Undang Ketenagalistrikan (RUUK) oleh DPR, September mendatang.

Jaminan tak akan adanya kartel listrik adalah adanya Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (BPPTL) yang bertanggung jawab langsung ke presiden. Salah satu fungsi BPPTL, mencegah persaingan usaha tidak sehat, seperti upaya pelaku usaha dalam meredakan kekuatan monopoli, oligopoli, kartel, dan pemblokiran pada segmen usaha yang dikompetisikan.

Demikian penjelasan Dirut Utama PLN Eddie Widiono yang didampingi Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luluk Sumiarso dalam jumpa pers usai pertemuan dengan 19 pimpinan perusahaan energi dan kelistrikan di Jakarta,

Kamis (29/8).

Untuk menjaga akuntabilitas keputusannya, keanggotaan BPPTL tidak diperkenankan berasal dari atau yang masih berafiliasi dengan pelaku pasar tenaga listrik serta harus melalui persetujuan DPR. BPPTL itu rencananya dibentuk paling lambat setahun setelah RUUK disahkan dan berlaku menjadi UUK.

"BPPTL itu harus mampu merespons dengan cepat perubahan-perubahan yang mungkin akan menyebabkan harga naik dan hal yang merugikan konsumen lainnya. Oleh karena itu, BPPTL harus independen dan dapat mengintervensi. Jangan sampai BPPTL tidak dapat berbuat apa-apa," kata Eddie.

Diungkapkan oleh Eddie, pada skenario rendah, permintaan pelanggan listrik PLN diperkirakan akan meningkat tujuh sampai sembilan persen per tahun. Namun, dengan pertumbuhan ekonomi yang sekitar 3,5-4,0 persen per tahun, sulit untuk menambah pembangkit dan infrastruktur listrik baru.

"Tidak mungkin seluruh pendapatan PLN dipakai un-

tuk membangun infrastruktur baru. Kalau itu terjadi, PLN tidak bisa membeli bahan energi primer pembangkit listrik. Kebutuhan investasi sekitar Rp 20 triliun per tahun," ujar Eddie.

Hal utama yang dipertanyakan investor adalah soal harga jual listrik. Tingkat ekonomis tarif adalah tujuh sen dollar AS per kWh. Namun, biaya produksi listrik PLN sekitar 5,5 sen dollar AS per kWh. Tarif PLN untuk pelanggan rata-rata 4,5 sen dollar AS per kWh. Target PLN pada tahun 2005, tarif listrik mencapai tu-

juh sen dollar AS per kWh.

Tanpa kehadiran listrik swasta, pemerintah tidak akan mampu mengejar pertumbuhan permintaan sehingga akan terus ada daerah yang kekurangan pasokan listrik. PLN dapat meminjam dana dari luar negeri, tetapi pinjaman itu akan masuk sebagai utang negara.

Sementara, tren dana investasi infrastruktur di seluruh dunia sedang menurun hingga 60 persen. Akibatnya, setiap negara harus bersaing ketat untuk memperoleh pinjaman infrastruktur. (TIA)